

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Indeks Pembangunan Manusia

Pengetahuan tentang pembangunan manusia (*human development*) mulai berkembang pada dekade 1990-an, pembangunan manusia didefinisikan sebagai pembangunan yang berorientasi pada manusia (*people centered development*). Pembangunan manusia dikembangkan oleh Amartya Sen yang merupakan pemenang nobel India dan oleh seorang ekonom dari Pakistan bernama Mahhubul Haq pada tahun 1990, serta dibantu oleh Gustav Ranis yang berasal dari *Yale University* dan seorang lagi bernama Lord Maghnad Desai berasal dari *London School of Economics*. Sejak perkembangannya indeks ini mulai dipakai oleh program pembangunan oleh PBB pada laporan tahunan mengenai angka indeks pembangunan manusia. Capaian pembangunan manusia dapat diukur dengan berbagai ukuran, dan hingga saat ini populer dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) (Septiarini dan Harianingrum, 2017).

Human Development Index (HDI) atau yang lebih dikenal dengan IPM dibuat dan diperkenalkan oleh *United National Development Programme* (UNDP). Menurut UNDP, yaitu sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk (*enlarging the choices of*

people) yang dapat dilihat sebagai proses menuju ke arah perluasan pilihan sekaligus menjadi ukuran yang dicapai dari suatu upaya dalam meningkatkan aspek kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

UNDP memperkenalkan suatu indikator yang telah dikembangkannya, yaitu suatu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representatif, yang dinamakan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan ukuran yang menggambarkan capaian terhadap kesejahteraan masyarakat atas tingkat pendidikan, kualitas kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam IPM terdapat empat indikator yaitu mengenai angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli (ekonomi).

Menurut Basuki dan Saptutyingsih (2016) IPM dapat melihat pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia:

- a. Hidup sehat dan panjang umur yang dapat diukur dengan melihat angka harapan hidup saat kelahiran.
- b. Pengetahuan atau tingkat pendidikan yang dapat diukur dengan melihat tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas *gross enrollment ratio* (bobot satu per tiga).

- c. Standar hidup layak dapat diukur dengan logaritma natural dengan angka produk domestik bruto perkapita dalam paritasi daya beli.

Setiap tahunnya daftar negara menurut IPM diumumkan berdasarkan penilaian diatas. Pengukuran alternatif lain adalah indeks kemiskinan manusia yang lebih berfokus kepada kemiskinan. Modal dalam arti luas memiliki peranan penting dalam proses pertumbuhan serta pembangunan ekonomi. Mengacu pada *Man Dixon* dan *World Bank*, modal dalam arti luas, meliputi modal fisik (*physical capital*), modal manusia (*human capital*) dan modal alam (*natural capital*). Pertumbuhan dan kemajuan ekonomi yang dicapai sangat tergantung pada peningkatan pembentukan modal dalam arti luas, baik pembentukan modal fisik, modal manusia maupun modal alam. Menurut *World Bank*, modal fisik, modal manusia dan modal alam merupakan faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan (Abbas, 2010).

Menurut UNDP, apabila suatu negara mempunyai target dalam pertumbuhan ekonomi dengan konsep melakukan pembangunan manusia, maka terdapat beberapa aspek yang diperhatikan diantaranya:

- 1) Produktivitas

Dalam sebuah proses pembangunan ekonomi dengan konsep pembangunan manusia, faktor penduduk sangat penting menjadi sebuah tolak ukur dimana penduduk mampu meningkatkan

produktivitasnya guna mendapatkan penghasilan untuk menafkahi keluarganya.

2) Pemerataan

Setiap penduduk memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya ekonomi maupun sosial di negaranya sehingga mereka dapat memperoleh manfaat yang lebih sehingga mereka mampu meningkatkan produktivitasnya dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya.

3) Kestinambungan

Ketersediaan sumber daya ekonomi maupun sosial harus selalu dapat diperbarui agar generasi sekarang maupun generasi yang akan datang memiliki akses dalam mendapatkan sumber daya fisik, manusia dan lingkungan dengan mudah.

4) Pemberdayaan

Untuk memperoleh manfaat dari pembangunan maka masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi secara aktif dalam upaya pembangunan demi keberlangsungan hidup kedepannya. Oleh karena itu, penduduk perlu adanya pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kualitas setiap individu dari segala kalangan masyarakat.

Menurut Hakim (2002), *United Nations Development Programe* (UNDP) mengartikan bahwa pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan bagi masyarakat. Yang menyangkut hal penting mengenai pilihan untuk berumur panjang dan juga hidup sehat,

memperoleh tingkat pendidikan yang berkualitas dan memiliki standar hidup yang layak. UNDP juga telah menyusun ukuran alternatif tentang kesejahteraan yang dikenal dengan indeks pembangunan manusia. Terdapat lima cara dalam pengembangan sumber daya manusia diantaranya:

- a) Fasilitas dan pelayanan kesehatan, pada umumnya diartikan mencakup semua pengeluaran yang mempengaruhi harapan hidup, kekuatan dan stamina, tenaga serta vitalitas rakyat.
- b) Latihan jabatan, termasuk model lama yang diorganisasikan oleh perusahaan.
- c) Pendidikan yang di organisasikan secara formal pada tingkat dasar, menengah dan tinggi.
- d) Program studi bagi orang dewasa yang tidak diorganisasikan oleh perusahaan, termasuk program ekstensi khususnya pada pertanian.
- e) Migrasi perorangan dan keluarga untuk menyesuaikan diri dengan kesempatan kerja yang selalu berubah.

Perkembangan pembangunan manusia di Indonesia, sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memungkinkan penduduk untuk mengalokasikan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan menjadi lebih banyak. Sementara itu, pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan relatif sedikit. Kebutuhan akan peningkatan alokasi pengeluaran pemerintah untuk kedua bidang sosial tersebut makin sangat dibutuhkan.

Pembangunan manusia dapat diartikan sebagai “proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara, pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk” hal ini dikarenakan manusia merupakan modal utama yang berperan dalam terciptanya suatu pembangunan dari sebuah bangsa atau negara.

2. Teori Pembangunan Sumber Daya Manusia

Modal Manusia adalah suatu usaha dengan biaya waktu sekarang untuk meningkatkan produktivitas pada masa depan. Dalam proses yang memerlukan biaya tersebut, kegiatan yang dilakukan oleh individu dengan tujuan investasi untuk masa depan adalah pendidikan, pelatihan, migrasi, kesehatan dan juga bekerja. Dalam perhitungan investasi modal manusia, terdapat *rate of return* dan *cost benefit*. Manfaat (*return*) yang dimaksud adalah penghasilan yang akan diperoleh setelah menyelesaikan masa sekolah. Sedangkan biaya adalah biaya yang dikeluarkan untuk bersekolah. Namun, dalam setiap keputusan, selalu ada hal lain yang harus dikorbankan yang disebut dengan biaya oportunitas. Biaya oportunitas merupakan penghasilan yang akan diterimanya apabila seseorang memilih untuk tidak bersekolah.

Harapan dari berinvestasi pada hakikatnya adalah untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Dalam sebuah

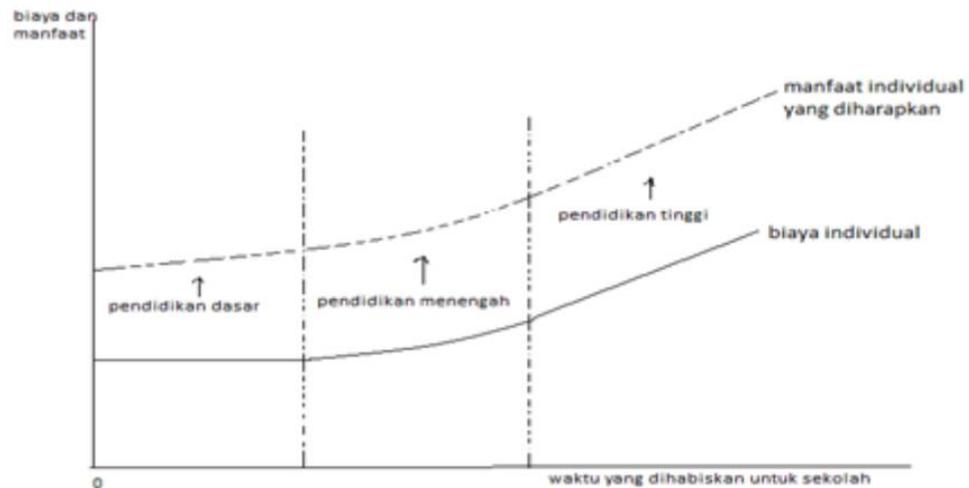
investasi tentunya memiliki biaya. Misalnya yang berkaitan dengan manusia, biayanya adalah membayar biaya untuk bersekolah. Kemudian, akan menghasilkan *return* (penghasilan) yang akan diterima di masa depan setelah menyelesaikan sekolah dan bekerja. Investasi memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar di masa depan daripada biaya yang dikeluarkan saat berinvestasi.

Manfaat dari adanya pendidikan sebagai investasi pada sumber daya manusia bagi pembangunan ekonomi suatu bangsa secara umum dapat dilihat dari pendapat Todaro (2011) diantaranya:

- 1) Dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif, karena adanya peningkatan pengetahuan dan keahlian.
- 2) Tersedianya kesempatan kerja yang lebih luas.
- 3) Terciptanya suatu kelompok pemimpin yang terdidik guna mengisi jabatan-jabatan penting dalam dunia usaha maupun pemerintahan.
- 4) Tersedianya berbagai macam program pendidikan dan pelatihan yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan dalam keahlian dan mengurangi angka buta huruf.

Pendidikan mampu mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan peningkatan pembangunan manusia melalui keahlian dan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan. Keahlian dan ilmu pengetahuan yang tinggi akan meningkatkan produktivitas masyarakat yang berdampak pada peningkatan hasil produksi yang dikerjakan. Hal

ini akan membantu menaikkan tingkat pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan standar hidup serta kualitas hidup masyarakat.

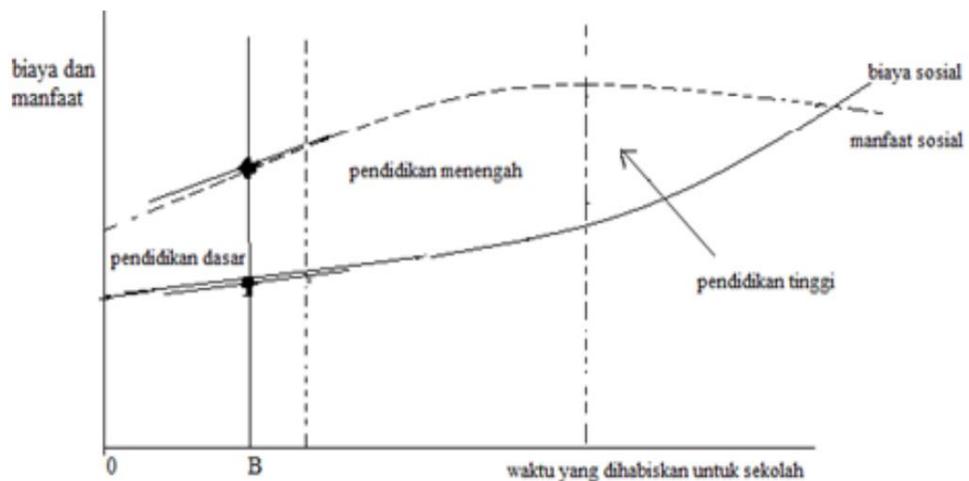


Sumber: Todaro dan Smith (2011).

Gambar 2.1
Biaya dan Manfaat Individual

Berdasarkan Gambar 2.1 menunjukkan bahwa tingginya tingkat pendidikan yang dicapai seseorang akan meningkatkan penghasilan yang akan di dapatkan, sehingga akan berdampak bertambahnya biaya hidup sehari-hari yang akan dikeluarkan. Biaya lain yang harus dikeluarkan adalah biaya pendidikan secara sosial. *Social cost of education* adalah biaya yang harus dikorbankan oleh masyarakat seluruhnya sebagai dampak dari adanya kebutuhan untuk membiayai pendidikan yang lebih tinggi dan mahal dengan dana yang nantinya akan menjadi lebih produktif jika digunakan untuk kebutuhan sektor-sektor ekonomi yang lain. Biaya individu dan biaya sosial apabila dibandingkan maka sebenarnya biaya

pendidikan bagi masyarakat secara sosial akan jauh lebih kecil daripada manfaat bagi individu (Todaro dan Smith, 2011).



Sumber: Todaro dan Smith (2011).

Gambar 2.2
Manfaat dan Biaya Sosial

Berdasarkan Gambar 2.2 menunjukkan bahwa kurva biaya dan manfaat sosial pendidikan dimana kurva social biaya sosial pada mulanya meningkat dengan naiknya tingkat pendidikan. Hal ini akan menunjukkan adanya perbaikan tingkat produktivitas dari seseorang yang mempunyai pendidikan dasar, kemudian kurva biaya sosial akan meningkat lebih lambat dan pada akhirnya akan cenderung mendatar. Kurva biaya sosial menunjukkan peningkatan yang rendah pada awal tahun pendidikan dasar, namun akan meningkat semakin cepat untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Dalam proses pembangunan ekonomi, pembangunan manusia adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Pembangunan manusia akan menciptakan kualitas sumber daya manusia yang tinggi sehingga akan menciptakan keuntungan yang maksimal. Modal manusia secara positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah yang nantinya akan menciptakan pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

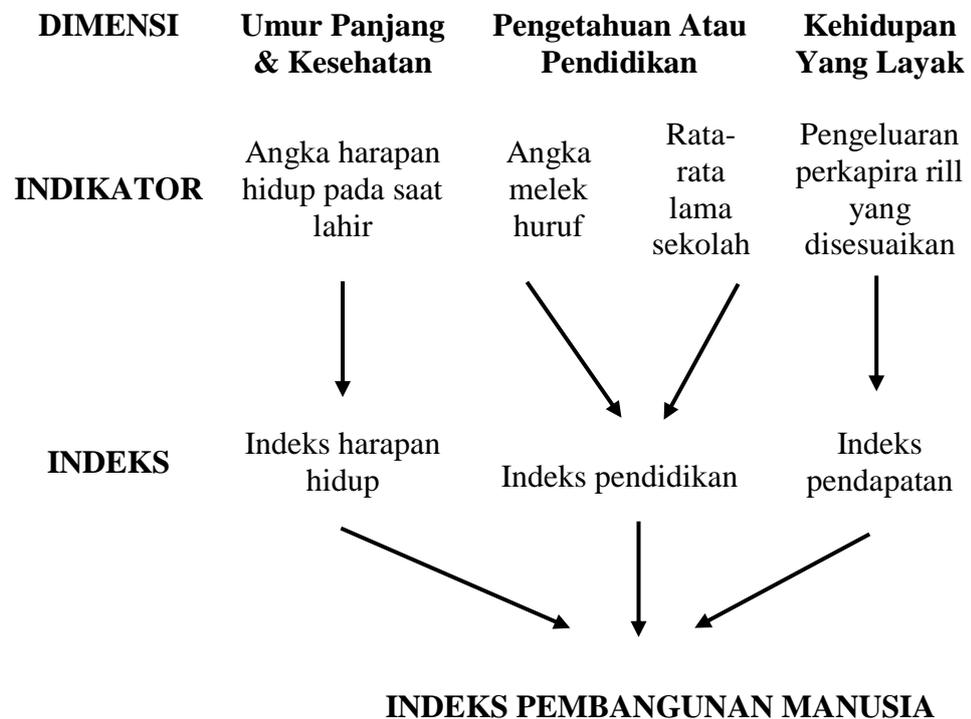
3. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Penjelasan di dalam indeks pembangunan manusia terdapat indikator yang dapat digunakan dalam mengukur capaian indeks pembangunan manusia pada suatu negara, diantaranya:

- 1) Tingkat kesehatan dapat dilihat melalui besarnya angka harapan hidup saat lahir atau angka kematian bayi.
- 2) Tingkat pendidikan yang dapat dilihat melalui angka harapan lama sekolah (memiliki bobot dua per tiga) sedangkan angka lama sekolah (memiliki bobot sepertiga).
- 3) Standar hidup layak dapat dilihat dengan indeks pendapatan yaitu seberapa besar angka pengeluaran perkapita tiap individu pertahun.

Penghitungan IPM dapat dilihat dengan melakukan berbagai pendekatan yaitu pendekatan pendapatan yang mencerminkan pencapaian pembangunan atas kehidupan yang layak. IPM merupakan ukuran untuk melihat tingkat kualitas hidup manusia yang dapat dibangun melalui beberapa pendekatan yang didalamnya terdapat dimensi atas umur panjang

dan tingkat kesehatan, tingkat pendidikan atau ilmu pengetahuan serta dimensi atas kehidupan yang layak. Untuk itu dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2007).

Gambar 2.3
Penghitungan IPM

Pada tahun 2010, UNDP melakukan penyempurnaan metode pengukuran IPM dengan mengubah metode yang sebelumnya memiliki indikator angka melek huruf menjadi angka harapan lama sekolah. Tujuan dari penggantian metode dari angka melek huruf menjadi angka harapan lama sekolah dikarenakan indikator angka melek huruf sudah tidak efektif digunakan karena angka melek huruf sudah menunjukkan angka yang

cukup besar diseluruh wilayah Indonesia sehingga tidak mencerminkan tingkat pendidikan yang ada.

a. Indeks Pembangunan Manusia Tradisional

Indikator yang paling luas digunakan untuk mengukur status komparatif pembangunan sosio-ekonomi disajikan dalam laporan tahunan UNDP yang berjudul *Human Development Report* (laporan pembangunan manusia). Yang bertujuan sebagai pembuatan dan penyempurnaan indeks pembangunan manusia (*Human Development Index- HDI*).

Menurut Todaro dan Smith (2011), HDI berupaya memeringkatkan seluruh negara mulai skala 0 (pembangunan manusia rendah) sampai 1 (pembangunan manusia tertinggi) berdasarkan pada tiga tujuan atau produk akhir pembangunan, yaitu:

- 1) Harapan hidup setelah lahir untuk mengetahui masa hidup (*longevity*).
- 2) Pengetahuan diukur dengan angka rata-rata tingkat melek aksara orang dewasa dengan bobot dua per tiga, dan rasio partisipasi sekolah bruto (*gross school enrollment ratio*) dengan bobot satu per tiga.
- 3) Standar hidup diukur berdasarkan angka produk domestik bruto perkapita yang disesuaikan dengan paritasi daya beli mata uang setiap negara yang nilainya berbeda-beda untuk mencerminkan biaya hidup dengan asumsi utilitas marginal yang semakin menurun (*diminishing marginal utility*) terhadap pendapatan.

b. Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru

UNDP pada tahun 2010 memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang baru (*New Human Development Index- NHDI*). Indeks ini masih menggunakan indikator standar hidup, pendidikan dan kesehatan, akan tetapi indeks baru ini memiliki beberapa perubahan, diantaranya:

- 1) Produk domestik bruto perkapita diganti menjadi pendapatan nasional bruto (*Gross National Income- GNI*).
- 2) Tingkat pendidikan dirubah secara menyeluruh, dengan dua komponen baru telah ditambahkan yaitu rata-rata pencapaian pendidikan aktual seluruh penduduk dan pencapaian pendidikan yang diharapkan dari anak-anak di masa kini. Masing-masing perubahan ini menimbulkan implikasi. Jelas sekali bahwa penggunaan ukuran pencapaian pendidikan aktual atau rata-rata lama bersekolah sebagai indikator merupakan perbaikan yang tidak ambigu. Estimasi dimutakhirkan secara teratur dan statistik dengan mudah diperbandingkan secara kuantitatif antar negara.
- 3) Pencapaian pendidikan yang diharapkan adalah komponen baru lainnya yang tidak ambigu, ukuran ini merupakan bersifat harapan yang dilakukan PBB, bukan pencapaian.
- 4) Indikator pendidikan dengan ukuran angka melek aksara dan partisipasi sekolah, dihilangkan atau tidak digunakan lagi.

Komponen-komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksnya sehingga bernilai antara 0 (terburuk) hingga 1 (terbaik). Menurut Kahang, dkk., (2016) agar mempermudah dalam analisa biasanya indeks ini dikalikan 100. Setiap komponen IPM distandarisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum sebagai berikut:

Tabel 2.1
Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM

| Komponen IPM | Maksimum | Minimum | Keterangan |
|------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Angka Harapan Hidup (tahun) | 85 | 20 | Standar BPS |
| Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) | 18 | 0 | Standar BPS |
| Rata-rata Lama Sekolah (tahun) | 15 | 0 | Standar BPS |
| Daya Beli (tahun) | 26.572.325 | 1.007.436 | Standar BPS |

Sumber: Badan Pusat Statistik 2014.

Menurut Kahang dkk., (2016) indeks komponen-komponen IPM menunjukkan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan, dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Indeks } X(i) = (X(i) - X(i) \text{ min}) / (X(i) \text{ maks} - X(i) \text{ min})$$

Dimana:

X (i) : Indikator ke-i (i = 1, 2, 3).

X (i) maks : Nilai maksimum X (i).

X (i) min : Nilai minimum X (i).

Paradigma pembangunan memposisikan manusia sebagai fokus dan sasaran dari suatu pembangunan, yaitu dapat tercapainya penguasaan atas sumber daya, peningkatan pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan. Rumus untuk menghitung indeks pembangunan manusia yaitu dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{IPM} = 1/3 (\text{X (1)} + \text{X (2)} + \text{X (3)})$$

Dimana:

X (1): Indeks harapan hidup.

X (2): Indeks pendidikan = $2/3$ (indeks melek huruf) + $1/3$ (indeks rata-rata).

X (3): Indeks standar hidup layak.

4. Komponen-Komponen Indeks Pembangunan Manusia

a. Angka Harapan Hidup

Penduduk adalah kekeyaan nyata suatu bangsa, perkembangan penduduk baik secara kualitas maupun kuantitas dipengaruhi oleh banyak faktor. Tidak hanya berbicara tentang pembangunan saja, tetapi juga harus paham tentang pembangunan yang berkualitas dengan resiko yang seminim mungkin dengan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat. Kualitas hidup yang dimiliki suatu negara, dapat menggambarkan kesejahteraan dan keberhasilan dari program-program yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan

kehidupan manusia. Terkait dengan kualitas hidup terdapat unsur Angka Harapan Hidup (AHH) di dalamnya.

Angka Harapan Hidup (AHH) menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk. Menurut statistik Indonesia, angka harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth*) merupakan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada tahun tertentu. Menurut BPS (2015) menyatakan bahwa angka harapan hidup merupakan rata-rata harapan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama menjalani kehidupan. Dengan demikian, indeks harapan hidup digunakan untuk mengukur usia rata-rata hidup penduduk. Standar yang digunakan adalah angka harapan hidup saat lahir.

Terdapat beberapa indikator yang dapat mempengaruhi angka harapan hidup dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2011-2013 diantaranya:

- a) Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.
- b) Rata-rata lama sakit (hari).
- c) Angka kesakitan (%).
- d) Persentase pemberian asi.
- e) Rata-rata lama balita disusui (bulan).

Indikator-indikator tersebut dapat mempengaruhi angka harapan hidup, sehingga indikator tersebut mengharuskan pemerintah untuk

meningkatkan program-program mengenai kesehatan seperti peningkatan pelayanan publik yang dapat berupaya meningkatkan angka harapan hidup bagi penduduk.

b. Tingkat Pendidikan

Pembangunan dibidang pendidikan memiliki tujuan utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Telah diakui bahwa pembangunan sumber daya manusia dalam suatu negara akan menentukan keberlangsungan dari pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia adalah pemeran utama yang dapat mengelola modal, mengeksploitasi berbagai sumber daya serta menjalankan berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan politik yang sangat penting bagi pembangunan sosial. Dengan demikian, peningkatan pendidikan suatu negara menjadi sangat penting dan dibutuhkan bagi pembangunan negara tersebut (Susanti dkk., 2012).

Proporsi pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, baik terhadap total pengeluaran pembangunan maupun produk domestik bruto, secara tidak langsung menunjukkan reaksi pemerintah atas semakin tingginya kebutuhan atas sarana dan prasarana pendidikan. Secara tidak langsung hal ini memperlihatkan seberapa jauh masyarakat menyadari pentingnya peranan pendidikan. Keadaan ini menjelaskan mengapa anggaran pengeluaran untuk sektor pendidikan

di negara maju pada umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi di negara yang sedang berkembang.

Melalui investasi pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang di peroleh oleh meningkatnya pengetahuan dan keterampilan yang akan mendorong peningkatan produktivitas kerja seseorang, dan pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas memperoleh kesejahteraan yang lebih baik dan terhindar dari kemiskinan. IPM dalam konteks pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan SDM, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia (Notoatmojo, 2009).

Menurut BPS (2015) dalam penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan diperoleh oleh anak pada umur tertentu di masa akan datang. Rata-rata lama sekolah dihitung untuk penduduk yang berusia 7 tahun ke atas.

Diasumsikan bahwa kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada masa yang akan datang sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat sekarang. Sedangkan rata-rata lama sekolah menggambarkan

jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk yang berusia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.

c. Standar Hidup Layak

Peraturan mengenai Kriteria Hidup Layak (KHL) secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 27 Ayat 2 yaitu “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup yang dihitung menggunakan metode tidak langsung (metode *Brass*, varian *Trussel*) berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Dalam cakupan luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi (Bhakti dkk., 2014).

Ukuran ini menunjukkan berapa sesungguhnya tingkat kemampuan individu atau suatu keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mereka dapat menjalankan kehidupan sehari-harinya secara layak. Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP menggunakan GNP riil yang disesuaikan. Produk nasional bruto perkapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran perkapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS. Rata-rata pengeluaran

perkapita setahun diperoleh dari SUSENAS, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota (BPS, 2015).

Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan, dan sisanya merupakan komoditas non-makanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao. Dalam perhitungannya, digunakan batasan minimum dan maksimum seperti yang dijelaskan bahwa batasan minimum standar layak hidup adalah sebesar 1.007.436 sedangkan batasan maksimumnya adalah sebesar 26.572.352 pertahun.

B. Pengaruh Variabel Independen Terhadap IPM

1. Pendapatan Asli Daerah

Salah satu bentuk dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. PAD mencerminkan *local taxing power* yang “cukup” sebagai *necessary condition* bagi terwujudnya proses otonomi daerah yang luas karena nilai dan proporsinya yang cukup dominan untuk mendanai daerah. Secara teoritis pengukuran kemandirian daerah diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan pendapatan daerah lainnya yang sah.

Pendapatan merupakan faktor penting bagi setiap orang dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh seseorang maka semakin banyak pula kebutuhan sehari-hari yang dapat dipenuhi. Oleh karena itu setiap daerah akan berusaha meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh pada pendapatan nasional.

Dengan adanya Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD), suatu daerah dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, lalu membelanjakan dana tersebut sesuai program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam peraturan daerah setempat. Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya membutuhkan modal manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan. Manusia dalam perannya merupakan subjek dan objek pembangunan yang berarti manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah adalah pendapatan atau penerimaan yang bersumber dari potensi-potensi yang berasal dari daerah tersebut yang bertujuan untuk membiayai, mengatur, dan mengurus kebutuhan rumah tangga daerahnya sendiri, dimana hal itu menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membangun daerah tersebut maka diharapkan pendapatan asli daerah yang besar dapat menunjang pembangunan di suatu daerah dan mengalokasikannya sesuai kebutuhan daerah guna meningkatkan pembangunan manusia.

2. Jumlah Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan kondisi dimana terjadinya kekurangan kebutuhan yang mendasar untuk dimiliki seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global, sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah "negara berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang "miskin".

Penduduk miskin biasanya akan lebih banyak atau bahkan semua pendapatannya digunakan untuk kebutuhan makanan, dibandingkan penduduk yang kaya. Akibatnya penduduk miskin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak jika hanya mengandalkan dari pendapatannya. Di sinilah perlunya campur tangan pemerintah untuk membantu penduduk yang kurang mampu atau miskin (Ginting dkk., 2008).

Kemiskinan akan menghambat individu untuk mengkonsumsi nutrisi bergizi, mendapatkan pendidikan yang layak serta menikmati lingkungan yang menunjang bagi hidup sehat. Dari sudut pandang ekonomi

kesemuanya itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Hal ini juga berimbas pada terbatasnya upah atau pendapatan yang dapat mereka peroleh. Sehingga dalam perkembangannya hal ini akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan menghambat pembangunan manusia di suatu daerah, dengan kata lain jika jumlah penduduk miskin meningkat maka menyebabkan penurunan indeks pembangunan manusia.

3. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

Suatu negara harus berupaya meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai terjadinya pembangunan. Isu mengenai sumber daya manusia (*human capital*) sebagai input pembangunan ekonomi, dan penyebab kesejahteraan suatu negara dengan memberikan dua faktor yaitu: pentingnya skala ekonomi dan pembentukan keahlian dan kualitas manusia. Menurut Hasibuan peningkatan produktivitas, khususnya produktivitas masyarakat dengan cara meningkatkan investasi di sektor pendidikan, sehingga terdapat keseimbangan yang lebih serasi antara investasi bagi sumber daya manusia dan investasi bagi modal fisik (Arifin dkk., 2015).

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat

yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi individu dalam memperoleh pekerjaan, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan untuk mencapai pembangunan (Kahang dkk., 2016).

Pengeluaran untuk sektor pendidikan diharapkan akan meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan yang baik dan murah, sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga dapat menjadi bekal dalam kegiatan pembangunan ekonomi sehingga dapat lebih produktif dan berdaya saing dan pada gilirannya diharapkan memiliki kemampuan ekonomi yang mapan dan stabil, diharapkan dapat berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia.

4. Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan

Pengeluaran pemerintah dalam sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia. Kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan

bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang.

Todaro dan Smith (2011) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan yang dikeluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan persyaratan bagi peningkatan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan, Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU No. 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sedangkan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji.

Oleh karena itu, kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi undang-undang. Perbaikan pelayanan kesehatan merupakan suatu investasi SDM untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (*welfare society*). Diharapkan dengan pengeluaran pemerintah yang semakin besar pada bidang kesehatan dapat berdampak terhadap kualitas dari tingkat kesehatan masyarakat yang terus meningkat. Pengeluaran untuk bidang kesehatan diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sehingga dapat lebih berdaya dalam melakukan kegiatan yang produktif yang berarti indeks pembangunan manusia juga menjadi lebih baik dan meningkat.

C. Penelitian Terdahulu

Didalam penelitian terdahulu terdapat beberapa penelitian yang digunakan untuk dijadikan referensi dalam studi penelitian ini. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang terdapat di dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Basuki dan Saptutyingsih (2016), melakukan penelitian dengan judul penelitian tentang analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia tahun 2008-2014 di Kab/Kota D.I. Yogyakarta. Variabel yang digunakan yaitu PDRB perkapita, gini rasio, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan fasilitas umum, dan jumlah penduduk miskin sebagai variabel independen, sedangkan indeks pembangunan manusia sebagai variabel dependen. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan analisis data panel dengan menggunakan metode *Random Effect*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan semua variable independen memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia terkecuali variabel pendapatan perkapita tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada Kab/Kota di D.I. Yogyakarta. Sebab rata-rata pendapatan perkapita tidak mampu mendorong kenaikan perkapita, atau dapat disimpulkan bahwa kenaikan pendapatan perkapita belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian oleh Sofilda dkk. (2015), dengan judul analisis variabel determinan indeks pembangunan manusia di Indonesia periode 2004-2013.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, menggunakan variabel PDB, tingkat pengangguran, alokasi anggaran pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, pengeluaran perkapita, dan gini rasio. Hasil dari penelitian ini adalah variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, alokasi anggaran untuk pendidikan, anggaran kesehatan, dan alokasi perumahan dan fasilitas umum berpengaruh signifikan terhadap IPM. Sedangkan pengeluaran rata-rata perkapita memiliki korelasi negatif dengan IPM, pertumbuhan penduduk dan rasio ketergantungan memiliki hubungan positif dengan IPM.

Kpolovie dkk. (2017), melakukan penelitian dengan judul perbandingan indeks pembangunan manusia di beberapa benua. Penelitian ini menggunakan variabel tingkat kesehatan, akses pengetahuan dan pendidikan, dan standar hidup layak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil yang signifikan bahwa di Eropa memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi, Afrika memiliki indeks pembangunan manusia terendah. Perkembangan manusia di setiap benua di dunia secara signifikan lebih besar dari Afrika. Nilai HDI negara-negara di Afrika secara statistik lebih rendah dan signifikan dari rata-rata indeks pembangunan manusia di seluruh dunia.

Penelitian oleh Akay dan Hanifi (2017), melakukan penelitian tentang determinan indeks pembangunan manusia di 130 negara di dunia dengan menggunakan variabel populasi pedesaan, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, PDB, jumlah pengguna internet, angka harapan hidup saat lahir. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat korelasi positif dalam jangka pendek antara variabel pengeluaran kesehatan, PDB, jumlah pengguna

internet, harapan hidup saat lahir, berbagai tahun terhadap IPM. Dalam jangka panjang, terdapat korelasi negatif antara variabel populasi pedesaan dan harapan hidup saat lahir dan indeks pembangunan manusia, dan memiliki korelasi positif antara variabel lain terhadap IPM. Jumlah penggunaan internet dan PDB perkapita adalah signifikan secara statistik pada tingkat pengembangan 130 negara yang dianalisis.

Ananta P. (2013), melakukan penelitian berjudul determinan indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung dengan menggunakan variabel PDRB perkapita, pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan, dan pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan. Pada penelitian ini menunjukkan secara bersama-sama variabel PDRB perkapita, variabel pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan, dan variabel pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan tiap kabupaten/kota secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel IPM tiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Penelitian yang dilakukan Sanar dan Lestari (2018), melakukan penelitian yang membahas tentang analisis indikator faktor yang mempengaruhi angka indeks pembangunan manusia (IPM). Pada penelitian ini sebagai variabel independen yaitu indeks harapan hidup, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan atau standar hidup layak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya variabel indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap indikator faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia dan hasil estimasi menggunakan model *Correlation Pearson* menunjukkan bahwa 14,788% adalah variasi dari

setiap pengamatan yang sama. Ini membuktikan bahwa ada hubungan antara satu sama lain antara satu variabel dengan variabel lainnya.

Penelitian oleh Akbar (2016), melakukan penelitian tentang indeks pembangunan manusia dengan judul, pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan bantuan sosial terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2014. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis regresi data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif yang signifikan pada indeks pembangunan manusia, sementara pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, infrastruktur, dan bantuan sosial tidak berpengaruh pada indeks pembangunan manusia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode waktu tersebut.

Penelitian oleh Dianaputra dan Aswitar (2017), melakukan penelitian yang berjudul pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Bali tahun 2011-2015. Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan pemerintah pada sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap indeks kualitas manusia. Pembiayaan pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan serta indeks kualitas manusia memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Serta pembiayaan pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan

memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia.

Penelitian oleh Kusuma (2018), melakukan penelitian tentang indeks pembangunan manusia dengan judul determinan indeks pembangunan manusia di D.I. Yogyakarta tahun 2006-2016, variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel pertumbuhan ekonomi bernilai positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, dan variabel belanja daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM.

Penelitian yang dilakukan Asmita dkk. (2017), melakukan penelitian mengenai indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara dengan menggunakan judul penelitian, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan variabel penelitian, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), persentase jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan, serta ketimpangan distribusi pendapatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi (PDRB) terhadap IPM memiliki pengaruh positif dan signifikan. Pengaruh persentase penduduk miskin, pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki

pengaruh yang signifikan. Belanja pemerintah untuk pendidikan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap IPM. Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM. Pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan tidak berpengaruh terhadap IPM.

D. Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada hasil penelitian terdahulu, beberapa studi telah meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah, jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Diantaranya memiliki hubungan sebagai berikut.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu Variabel Penelitian

| Variabel | Hubungan | Referensi |
|--|----------|---|
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | (+) | Kusuma (2018), Amalia (2016), Novianti (2016), Rahman (2016). |
| Jumlah Penduduk Miskin | (-) | Basuki dan Saptutyningsih (2016), Chalid dan Yusuf (2014), Anggraheni (2016), Nurhaini (2016). |
| Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan | (+) | Sofilda dkk (2015), Ananta P (2013), Akbar (2016), Fitrawaty dan Ruslan (2017), Angga dan Aswitar (2017), Aquariansyah (2018). |
| Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan | (+) | Basuki dan Saptutyningsih (2016), Akay dan Hanifi (2017), Sofilda dkk (2015), Fitrawaty dan Ruslan (2017), Angga dan Aswitar (2017), Ananta P (2013). |

Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

E. Hipotesis

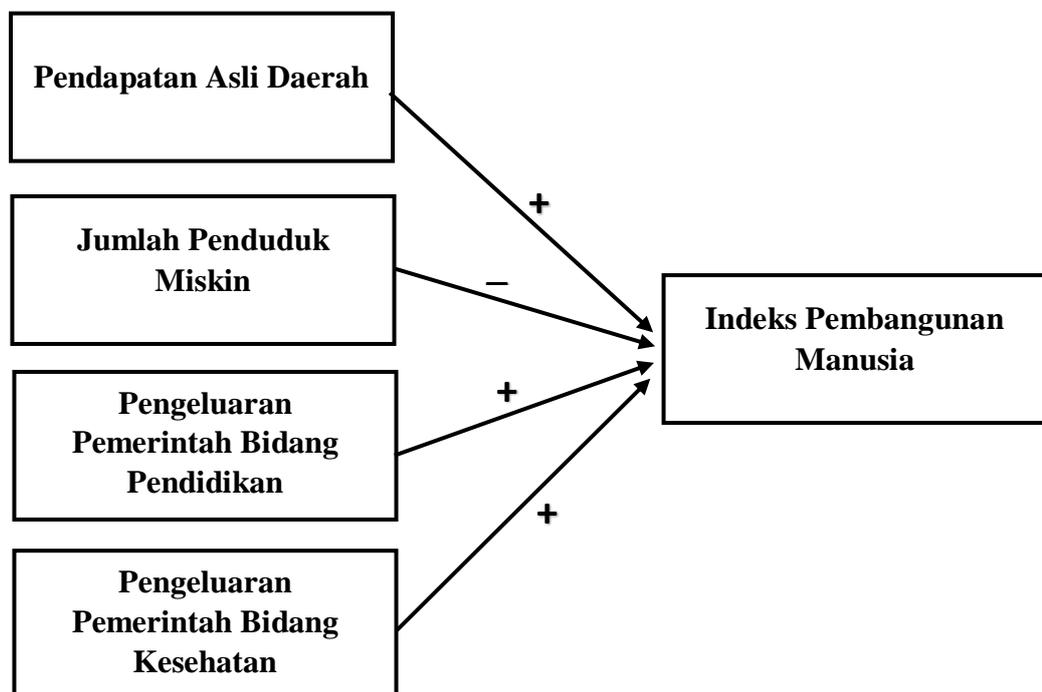
Hipotesis adalah kesimpulan sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang akan di uji oleh data. Hipotesis adalah sarana penelitian ilmiah yang penting dan tidak bisa ditinggalkan, karena ia merupakan instrumen kerja dari teori. Selain itu, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap persoalan penelitian sebelum mengumpulkan data. Maka dari itu rumusan masalah dari suatu penelitian di susun dalam bentuk pertanyaan.

Sehingga berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, dan penelitian terdahulu serta teori yang telah dijelaskan. Maka dapat menarik hipotesis untuk melihat pengaruh hubungan dari variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat dirumuskan dalam beberapa hipotesis penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Diduga variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
2. Diduga variabel Jumlah Penduduk Miskin memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
3. Diduga variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
4. Diduga variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

F. Kerangka Berfikir

Untuk mempermudah penelitian yang dilakukan dan memperjelas pemikiran dalam penelitian ini, mengenai penjelasan hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen. Dimana penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap indeks pembangunan manusia. Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan untuk melihat variabel apa saja yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Maka disusun suatu kerangka pemikiran penelitian yang akan dilakukan seperti gambar berikut.



Gambar 2.4
Kerangka Berfikir Penelitian